

# *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*

**Hendra Mondong**

## **ABSTRACT**

*Village Government in carrying out their duties and responsibilities has obstacles and problems. Obstacles and problems include: lack of human resource of vilagge's staffs, lack of facilities and infrastructure work, as well as the income is also low.*

*Government in the implementation of development policies, not fully open and the transparent government as it also have not fully cooperated with the entire community and in motivating the public to preserve the existing development. Therefore, as the village head of the village government to always do the activities and always pay attention to things like reasons the author described above, which is primarily in terms of execution and implementation of development policies, because according to the community where they feel that is what will they hold such as the head of the village in organizing the construction and implementation of the policy must be optimal and open to the public in providing participation should be higher.*

*Regarding the ability of village government in the implementation of policy and the government's ability to mobilize the participation of the village community, then it can be understood how extensive and complex problems faced by the village government in the implementation of policies to increase community participation in development and community organizing. In the implementation of the government's job as an administrator in the field of social development and can be categorized already succeeded, because the village government and government officials often go directly to the field by monitoring or to control any development activities that directly executed.*

*Keywords: participation, human resources, development*

## **Latar Belakang**

Harus kita sadari bahwa kehidupan bangsa ini saling

ketergantungan satu sama lainnya dalam hal menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh. Untuk menyikapi hal tersebut diharapkan keterlibatan dari semua aspek yang bersifat positif serta mendukung terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh yang salah satunya dalam bidang pembangunan. Peranan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan untuk menciptakan aparatur yang efisien, efektif bersih, dan beribawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan Negara.

Perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan pedesaan dengan segala aspeknya, karena titik tumpu pembangunan masyarakat Indonesia berada di pedesaan. Tetapi semuanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini. Keadaan yang demikian ini diperkuat oleh adanya kenyataan bahwa masyarakat pedesaan masih diliputi dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai kerawanan sosial lainnya. Perlu usaha yang terencana untuk membangun prasarana perhubungan desa, produksi, pemasaran dan prasarana desa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempunyai hambatan dan permasalahan. Hambatan dan permasalahan tersebut antara lain meliputi : kurangnya sumberdaya manusia Perangkat Desa, kurangnya sarana dan prasarana kerja, serta penghasilan yang masih rendah.

Kita memahami bahwa pembangunan dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dsb. Namun pemahaman yang demikian tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa adanya kritik maupun kontrol terhadapnya karena pada prinsipnya kehadiran pembangunan dapat diasumsikan sebagai satu-satunya cara untuk dapat memecahkan masalah dapat berbalik fakta, seperti adanya kesenjangan sosial-ekonomi, politik dan kebudayaan.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan dari pemerintahan setempat baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan maupun pemerintah desa. Dalam memainkan perannya dalam pembangunan desa, dalam proses penanggulangannya dan pemerintah juga harus melihat setiap kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan atau yang akan dilaksanakan, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, maupun melalui peraturan daerah yang akan dikeluarkan maupun yang akan

dijalankan. Sedangkan masyarakat sendiri yang akan diposisikan untuk menilainya apakah kebijakan-kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu pemecahan masalah ataukah sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru lagi dalam pembangunan tersebut.

Desa Koreng sampai saat ini masih melakukan pembangunan baik dari segi infrastruktur dan suprastruktur dan membenahi pelayanan publik yang sekian lama terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih dari pemerintah desa adalah pembuatan Bak penampungan Air bersih, perbaikan jalan dan pembangunan gedung sekolah. Pentingnya peran masyarakat dalam ikut serta memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga dalam program-program pemerintah desa

### **Konsep Peran Pemerintah**

Peranan merupakan aspek dinamis dari status, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, demikian pula sebaliknya. Dimana tak ada peranan tanpa kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka peranan juga mempunyai arti bahwa manusia mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Pemerintah dalam bahasa Inggris, disamakan dengan government yang diturunkan dari kata "to govern" yang mempunyai arti :

1. Melaksanakan wewenang pemerintah.
2. Cara atau sistem memerintah.
3. Fungsi atau kekuatan untuk memerintah.
4. Wilayah atau Negara untuk diperintah.
5. Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.

Dalam bahasa sehari-hari orang mencampur-adukan penggunaan istilah pemerintah dan pemerintahan, seolah-olah kedua-duanya mempunyai arti yang sama, padahal keduanya mempunyai arti yang berbeda. (Bayu Suryaningrat, 1980:1) menjelaskan perbedaan istilah pemerintah dan pemerintahan sbb : istilah pemerintahan menunjuk pada organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas, pekerjaan itu. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan menunjuk pada objek sedangkan istilah pemerintah menunjuk pada subjek. Kata pemerintah mempunyai arti sempit dan arti luas, pemerintah dalam arti

sempit menurut hukum tata Negara positif di Indonesia sekarang ini (menurut UUD 1945) adalah presiden atau dalam bidang eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, meliputi kekuasaan seperti Trias Politica atau Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

### **Konsep Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang – barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, dalam buku *otonomi desa* 2003:3).

Lembaga musyawarah desa merupakan wadah permusyawaratan atau mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan di dalam mengambil keputusannya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh yang berkembang dalam masyarakat desa. Dalam masyarakat tradisional untuk menggerakkan masyarakat desa sangat berbeda dengan menggerakkan masyarakat perkotaan.

### **Konsep Partisipasi**

Partisipasi berasal dari kata ; bahasa Inggris yaitu *participacion* dan kata kerjanya *participate* artinya peran serta : ikut mengambil bagian. Secara populer menjadi participation artinya peran atau ikut serta untuk mengambil bagian dalam kegiatan tertentu.

Untuk memperjelas pengertian tersebut Bhattacharyya (dalam Supriatna, 1985:30) mengatakan bahwa partisipasi menurut literatur berarti ikut serta mengambil bagian dalam kegiatanbersama. Sedangkan Mubyarto (1984:35) mendefinisikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Davis (dalam Ndraha, 1987:37) mengartikan partisipasi sebagai suatu dorongan mental dan emosional yang menggerakkan mereka untuk bersama sama mencapai tujuan dan bersama sama bertanggungjawab. Sedangkan Nelson (dalam Bryant &

White, 1982:206) menyebutkan dua macam yaitu partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antara klien dengan patron, atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah yang diberi nama partisipasi vertikal. Menurut Cohen dan Uphoff, (1977:3) menyatakan bahwa partisipasi dapat merupakan keluaran pembangunan dan juga merupakan masukannya sebab apabila masyarakat yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek di Desanya, maka proyek itu pada hakekatnya bukanlah proyek pembangunan desa.

### **Konsep Masyarakat**

Para ahli seperti MacIver, J. L. Gillin, dan J. P. Gillin sepakat, bahwa adanya sering bergaul atau interaksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat-istiadat tertentu, yang bersifat continue dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Kesatuan sosial memiliki kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kesadaran masyarakat dan sebagainya. Dalam hal ini individu berada dibawah pengaruh suatu kesatuan sosial. Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat, meliputi pranata, status dan peranan sosial. Pranata sebagai wahana berinteraksi menurut pola resmi, merupakan sistem norma khusus menata rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi kebutuhan khusus manusia. Status atau kedudukan sosial dapat netral, tinggi, menengah, atau rendah. Hubungannya dengan tindakan interaksi dikonsepsikan oleh norma yang mengatur seluruh tindakan tadi. Peranan sosial adalah tindakan atau tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu, bersifat khas, tertentu dalam berhadapan dengan individu-individu dalam kedudukan lain.

### **Konsep Pembangunan**

Istilah pembangunan juga menunjukkan hasil proses pembangunan itu sendiri. Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata bangun, di awalan "pe" dan akhiran "an", guna menunjukkan perihal orang membangun, atau perihal bagaimana pekerjaan membangun itu dilaksanakan. Kata bangun setidaknya-tidaknya mengandung tiga arti. bangun dalam arti sadar atau siuman. Kedua, berarti bentuk. Ketiga, bangun berarti kata kerja, membangun berarti mendirikan. Dilihat dari segi ini, konsep, pembangunan meliputi ketiga

arti tersebut. Konsep itu menunjukkan pembangunan sebagai :

1. Masukan, kesadaran kondisi mutlak bagi berhasilnya perjuangan bangsa.
2. Proses, yaitu membangun atau mendirikan berbagai kebutuhan berdasarkan nasional.
3. Keluaran, yaitu berbagai bentuk bangun sebagai hasil perjuangan, baik fisik maupun non fisik (Taliziduhu Ndraha, 1987:1-2).

Para ahli banyak menggunakan berbagai istilah dalam mendefinisikan pembangunan. Antara lain dengan menggunakan kata Modernisasi, perubahan sosial (sosial change), development, pertumbuhan (growth) dan lain sebagainya. Kata pembangunan seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli sangatlah bervariasi. Antara lain seperti yang dikatakan oleh Bimantoro Tjokoamidjojo dan Mustopadidjaja yang menyebutkan bahwa pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir.

Sondang P. Siagian mengemukakan pendapatnya mengenai pembangunan itu adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa secara sadar, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Dari berbagai definisi yang di kemukakan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, kebersamaan, kesempatan, kemandirian dan saling ketergantungan masyarakat, yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

### **Konsep Desa**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa, dalam definisi lainnya, adalah suatu tempat atau daerah di mana penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka. Desa adalah pola permukiman yang bersifat dinamis, di mana para penghuninya senantiasa melakukan adaptasi spasial dan ekologis sederap kegiatannya berpangupajiwa agraris. Desa dalam arti administratif, menurut Sutardjo Kartohadikusumo, adalah suatu kesatuan hukum di mana sekelompok masyarakat bertempat tinggal dan mengadakan pemerintahan sendiri.

Penamaan atau istilah desa, disesuaikan dengan kondisi sosial

budaya masyarakat setempat seperti kampung, desa, dusun, dan sebagainya, susunan Sali tersebut bersifat istimewa. Pengaturan mengenai pemerintahan desa telah terjadi pergeseran kewenangan sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi ikut campur tangan secara langsung tetapi bersifat fasilitator yaitu memberikan pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan dan termasuk pengawasan presentatif terhadap peraturan desa dan APBD.

#### **A. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu keputusan yang nantinya kan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak. Kemudian pemerintah desa juga hams memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat.

- Sebagai dinamisator ; tentunya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.
- Sebagai katalisator ; ini berkaitan dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.
- Sebagai Pelopor ; Sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kewibawaan tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi( loyalitas ) yang tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik pula terhadap masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani oleh masyarakat.

Desa Koreng Kabupaten Minahasa Selatan khususnya menunjukan bahwa kepala desa atau Hukum Tua selaku pemerintah desa sudah mempunyai kemampuan untuk menggerakkan partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan, karena pemerintah desa dalam hal ini Hukum Tua sering melibatkan diri atau sering terjun

langsung ke lapangan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pembangunan tersebut karena pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Disamping itu juga, Hukum Tua selaku pemerintah desa dijadikan pola panutan yang tinggi sehingga masyarakat merasa terpanggil untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan.

Strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka untuk meningkatkan keinginan masyarakat di Desa Koreng untuk berpartisipasi dalam pembangunan, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

## **1. Pembinaan terhadap masyarakat**

### **1.1. Pembinaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi**

Peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori mengatakan bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan warga desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemerintah desa khususnya pimpinan atau kepala desa.

### **1.2. Pembinaan masyarakat desa pada bidang hukum**

Pembinaan di bidang hukum dilakukan oleh pemerintah desa dengan bekerja sama dengan dinas terkait dan pihak kepolisian yang dimaksudkan agar pemuda dapat memberikan bimbingan kemasyarakatan dan p;engentasan anak dilembaga-lembaga pemasyarakatan anak Negara. Contoh pemuda berkumpul untuk diberi penyuluhan tentang akibat adanya perkelahian antar pelajar atau semacamnya.

### **1.3. Pembinaan masyarakat dibidang agama**

Pembinaan ini untuk meningkatkan kehidupan beragama dikalangan masyarakat. Contohnya kerja bakti untuk membangun atau membersihkan tempat ibadah.

### **1.4. Pembinaan masyarakat dalam bidang kesehatan**

Pembinaan ini ditujukan untuk pembentukan generasi muda yang sehat baik fisik maupun mental serta mampu berperan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan linglcunganya.

## **2. Pelayanan terhadap Masyarakat**

Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsive terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, dimana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan focus pada pengelolaan yang berorientasi pada masyarakat. Adapun bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan yaitu apabila masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan maka aparat pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.

## **3. Pengembangan terhadap masyarakat**

Efektifnya masyarakat dalam suatu program atau suatu kebijakan seperti halnya kebijakan tentang pelaksanaan dalam upaya meningkatkan pembangunan desa tidak terlepas dan dukungan atau partisipasi dari masyarakat untuk menaati atau melaksanakan peraturan yang ada. Peraturan dalam hal ini pada dasarnya bertujuan bagi 2 aspek yakni bagi pemerintah desa dan bagi masyarakat itu sendiri. Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui karena begitu pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga masyarakat terlebih dahulu diberikan dasar yang kokoh agar tingkat partisipasi yang diberikan masyarakat bisa maksimal. Menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan memberikan arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis disamping pemerintah dan swasta. Posisi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi disamping itu masyarakat juga berperan sebagai perencana dan pengontrol berbagai program pembangunan baik program yang datang dari pemerintah maupun program yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat di Desa Koreng ;

### **• Partisipasi Pikiran**

Mengajak masyarakat untuk terus terlibat dalam program-program pembangunan di Desa bukanlah hal mudah. Hal ini karena masyarakat selalu beranggapan bahwa program-program pembangunan

di Desa adalah pekerjaan pemerintah yang pada dasarnya mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan program-program pembangunan tersebut. Oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan haruslah diberi upah.

Masyarakat Desa Koreng utamanya para tokohnya senantiasa memikirkan tentang kebutuhan bersama warga desa mereka yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan mereka, yaitu kepala desa untuk diperjuangkan pada tingkat kecamatan maupun kabupaten. Keinginan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat tersebut tentu bukan juga merupakan pemikiran dan keinginan mereka sendiri akan tetapi juga merupakan keinginan warga masyarakat.

Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran yang disampaikan sebagai masukan, sebagian masyarakat sebagian juga memberikan masukan pikiran-pikiran teknis dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

#### • **Partisipasi Tenaga**

Tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat desa yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan desa, khususnya dalam pengerjaan proyek-proyek fisik. Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal dipedesaan dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan atas dasar gotong royong dan swadaya. Dengan dana yang terbatas, mereka mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan fisik yang mahal, misalnya penambahan volume bak penampungan air desa, balai desa, bahkan sekolah dan lain sebagainya. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa mengarahkan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya tidak semata-mata tergantung pada aspek anggaran. Kepemimpinan juga merupakan faktor yang ikut menentukan tingkat partisipasi masyarakat desa. Artinya, kepala desa beserta aparat desanya harus mampu menjalankan roda pemerintahan desanya secara jujur, transparan, akuntabel dan religious. Dengan demikian masyarakat yang dipimpin akan cenderung mengikuti arahan dari pemerintah desa guna menyumbangkan tenaga mereka dalam pelaksanaan pembangunan di Desanya.

Oleh karena itu walaupun tersedia anggaran untuk pembangunan, namun mereka tidak berharap untuk dibayar. Dilain pihak, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa pada dasarnya semua masyarakat Desa Koreng ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan terutama dalam bentuk partisipasi tenaga.

#### • **Partisipasi Barang/Uang**

Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan sangatlah baik, sebagaimana salah satu dari pentingnya partisipasi dalam kegiatan yang dikemukakan oleh Dr. Lastaire White dalam Sastropoetro, yakni dengan partisipasi dari masyarakat, maka hasil kerja yang dicapai akan lebih banyak dibandingkan dengan pengerjaannya tanpa melibatkan masyarakat.

### **B. Kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat**

Pemerintah dalam hal ini adalah aparatur pemerintah di Desa sebagai administrator di bidang pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam hal ini pelaksanaan kebijakan sehubungan dengan program pembangunan yang dilaksanakan dalam tingkat desa. Dapat dikatakan demikian karena Kepala Desa bersama dengan pemerintah desa lainnya diharapkan mampu menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan tersebut lewat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan atau dilaksanakan.

Peran serta masyarakat pada umumnya tentu tidak lepas dari pelaksanaan pembangunan tidak hanya semata-mata berada di tangan pemerintah saja akan tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga, sebab dalam hal ini masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dan pada pembangunan tersebut. Kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan masyarakat bahkan banyak kasus yang menentang pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal yaitu :

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan bukan menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi ekstrim dirasakan merugikan.
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut.
3. Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman tersebut.
4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi rakyat tidak di ikutsertakan.

Sampai saat ini, proses pembangunan di Desa Koreng masih terus berkembang. Pemerintah desa dalam membuat kebijakan-kebijakan dirasa telah mampu dalam pelaksanaannya.

### **C. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku Pemerintah di Desa**

Kepala desa selaku pemerintah di desa harus selalu melakukan upaya-upaya yang tidak merugikan rakyat banyak seperti dalam memahami aspirasi ataupun kebutuhan masyarakat secara keseluruhan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Hal seperti inilah yang selalu mendapatkan maknanya, karena dari segala bentuk pembangunan yang dilakukan baik itu berasal dari jalur pemerintahan, pemimpin maupun secara kemasyarakatan lewat aspirasi yang disampaikan atau diberikan oleh rakyat atau masyarakat, bila dalam proses pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan mengena atau sesuai dengan harapan, maka pemerintah dalam hal ini kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak yang negatif dari masyarakat.

Keberhasilan pembangunan di Desa Koreng ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Keadaan desa yang meliputi keadaan sosial, budaya, keamanan.
2. Rencana pembangunan yang meliputi rencana, tujuan, sasaran, target dan strategi pencapaian.
3. Sarana pembangunan meliputi kelembagaan, dana dan SDM serta SDA yang tersedia.
4. Pelaksanaan, meliputi pelaksanaan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan serta pengaturan dan pelaksanaan rencana pembangunan.

Untuk mengakselerasikan pembangunan Desa Koreng dengan mencermati dan memperhitungkan potensi dan masalah maka ditetapkan 3(tiga) program utama yang nantinya diharapkan dapat menjadi pengarah utama jalannya roda pemerintahan, pembangunan desa serta dapat memberikan akses penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan dibidang lain. Program dimaksud antara lain :

1. Program pembangunan Sumber Daya Manusia.
2. Program penyelenggaraan pemerintah desa yang baik dan bersih.
3. Program pembangunan lingkungan hidup.

Disamping program utama di atas, sambil memperhatikan kondisi, kebutuhan, pelayanan masyarakat secara sistematis maupun komprehensif dalam satu kesatuan, maka ada beberapa program pembangunan desa yang merupakan penjabaran dari 3(tiga) program utama yang di atas yang meliputi :

1. Bidang pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Sarana dan prasarana.

Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan, kepala desa harus benar-benar dapat mensosialisasikan kepada setiap anggota masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan tersebut dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya, sehingga kebijakan tersebut yang sudah dilaksanakan di satu pihak tidak merugikan ataupun menghambat program pemerintah dan dilain pihak juga masyarakat merasa aspirasi mereka didengar dan sekaligus dilaksanakan serta tidak merasa dirugikan oleh pemerintah setempat. Jadi dalam hal ini kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan, baik dalam persoalan waktu maupun pikiran. Mengingat pula keinginan untuk menciptakan koordinasi yang sempurna antara pemerintah desa dengan masyarakat, maka dapat dikatakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah adalah dengan adanya kewibawaan dan gaya kepeloporan yang tinggi untuk diperlihatkan kepada masyarakat yang tercermin dalam diri seorang pemimpin, sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif tanpa ada paksaan dari siapapun karena merasa tergugah dengan adanya semangat kerja sama yang diperlihatkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.

Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan, belum sepenuhnya terbuka dan transparan disamping itu juga pemerintah belum sepenuhnya bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dan dalam memotivasi masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan yang sudah ada. Oleh karena itu, kepala desa sebagai pemerintah yang ada di desa untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan maupun selalu memperhatikan hal-hal seperti yang tersebut di atas, yaitu terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan, karena menurut masyarakat mana yang mereka rasakan itulah yang akan menjadi pegangan mereka misalnya kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara optimal dan terbuka sehingga masyarakat dalam memberikan partisipasinya akan lebih tinggi.

Untuk mencapai tingkat pembangunan desa yang maksimal yang dalam hal ini pembangunan di Desa Koreng, maka kepala desa selaku pemerintah desa memerlukan beberapa langkah strategis dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Melembagakan dan memberdayakan fungsi kontrol oleh pihak yang berwenang.

2. Melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan.
3. Melakukan monitoring.
4. Memperbaiki kebijakan-kebijakan strategis yang nantinya diarahkan kepada kebijakan riil masyarakat.
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian program yang selaras dengan perkembangan lingkungan.

Langkah-langkah yang diambil oleh kepala Desa Koreng tersebut, mendapatkan dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat sebagai berikut :

1. Koordinasi , digunakan untuk meningkatkan hubungan kerja antar aparat desa dan kelembagaan BPD, LPMD, dan PKK agar terjalin sinergitas hubungan yang dinamis dan harmoni yang dapat meningkatkan kinerja aparat desa.
2. Sosialisasi, digunakan dalam rangka menyebar luaskan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh hukum tua sebagai penanggung jawab atas tugas pemerintahan disertai dengan sosialisasi peraturan-peraturan desa yang telah dirumuskan bersama dengan BPD, sekaligus mendorong peran dan partisipasi penuh komponen masyarakat dalam menyukseskan program pembangunan di Desa dalam rangka pemberantasan kemiskinan.
3. Dialog, membuka forum-forum dialog antara pemerintah desa dan komponen masyarakat untuk menjaring keinginan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya pembiasan informasi yang tidak benar yang dapat memicu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Pengawasan, digunakan agar kinerja pemerintah dan lembaga mitra BPD, LPMD, dan PKK masing-masing memberikan kontribusi positif guna pencapaian tujuan pembangunan yang diharapkan.

#### **D. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.**

Mengenai kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan maupun dari kemampuan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi dari masyarakat, maka dapatlah dipahami bagaimana luas dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan dan kemasyarakatan.

Harus diakui juga bahwa pemerintah desa tidak akan sempurna apabila ia tidak memperhatikan kekurangan ataupun kendala-kendala ataupun kebiasaan yang dihadapi langsung oleh masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan.

Kendala-kendala ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dihadapi oleh masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

#### *Tingkat Kesadaran Masyarakat*

Tingkat kesadaran dari seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan memang dapat dikatakan relatif karena setiap perencanaan yang ada untuk melaksanakan pembangunan, maka masyarakat dengan tidak sendirinya berpartisipasi aktif tetapi selalu melalui paksaan ataupun panggilan langsung dari aparat pemerintah desa.

#### *Tingkat Pendidikan Masyarakat*

Pendidikan merupakan faktor penting untuk dimiliki oleh seluruh komponen warga Negara karena dengan pendidikan warga Negara akan mampu merubah sikap dan perilaku bahkan hidup mereka yang lebih baik. Namun apabila kita melihat tingkat pendidikan yang ada di Desa Koreng Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakatnya mempunyai tingkat pendidikan yang cukup lumayan karena kebanyakan dari mereka adalah lulusan SMP. Untuk itu bagaimana seorang pemerintah untuk dapat menggali potensi-potensi pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

#### *Sikap Mental Masyarakat*

Faktor tradisi masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat memang selalu ada seperti berpesta, hidup boron, dalam melakukan hal-hal yang kurang berguna maupun dalam menghargai waktu yang terus berjalan dan terus berlalu itu namun hal tersebut di atas tidak menutup kemungkinan kepada masyarakat setempat untuk berbuat atau melakukan suatu karya atau apapun yang menurut mereka berguna bagi diri mereka sendiri maupun untuk keluarga bahkan untuk lingkungan mereka. Memang kebiasaan-kebiasaan seperti itu sangat sulit untuk kita rubah karena sudah tertanam dalam jiwa mereka, tinggal bagaimana pemerintah desa dapat memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dan apabila terdapat hal-hal yang positif atau faktor tradisi-tradisi positif masyarakat seperti kemauan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif, maka pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk

menunjang keberhasilan kepemimpinannya serta dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

### ***Faktor Ekonomi***

Pada umumnya masyarakat Desa Koreng memiliki mata pencaharian sebagai petani, dengan bertani mereka merasa kebutuhan masih belum mencukupi dan ada juga yang beberapa mengharuskan mereka agar bekerja di luar desa. Seperti warga yang tidak sempat berpartisipasi karena masih banyak warga yang kalau mereka tidak bekerja dalam beberapa hari, maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan mereka. Dan karena yang lain belum mempunyai wilayah garapannya sendiri mengharuskan mereka untuk keluar daerah untuk menggarap lading orang lain.

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat bagi terlaksananya pembangunan sudah berperan dengan baik dalam rangka mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat.
- 2) Kemudian dilihat dari segi kemampuan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sudah mampu, sesuai dengan informasi yang ada..
- 3) Terdapat beberapa faktor penghambat, namun hal yang demikian masih dapat diantisipasi oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah kepala desa atau dengan sebutan lain hukum tua lewat motivasi-motivasi yang disampaikan langsung serta selalu meningkatkan efektifitas kerja dan setiap aparatur pemerintah.
- 4) Dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagai administrator dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan sudah dapat dikategorikan berhasil, karena para pemerintah desa dan aparatur pemerintah sering terjun langsung ke lapangan untuk memantau ataupun untuk mengawasi langsung setiap kegiatan pembangunan yang sementara dilaksanakan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Suryaningrat, Bayu, 1980. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Bina aksara. Jakarta.
- Cohen, J. M. and Norman T. Uphoff, 1977, *Rural Development : Participation*. Itacha, Cornel University Press.

- Pamudji. S, 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan diIndonesia*, Bina Aksara. Jakarta.
- Ndraha Taliziduhu, 1987. *Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan*. Yayasan Karya Dharma. Jakarta.
- Sugiyono, 2003. *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Bryant and White, 1982. *Pembangunan Masyarakat*. LIBERTY. Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W, J, S, 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sumardi and Evers, 1982. *Kelompok Elit dan Hubungan sosial di Pedesaan*. Pustaka Grafita Kita. Jakarta.
- Colleta dan Kayam, 1987, *Pengembangan Wilayah Pedesaan*. Bina Aksara. Jakarta.
- Todoro P. Michael, 2002. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Landis H. Paul, 2000. *Emansipasi dan Demokrasi mulai dari Desa*. LAPERA, Pustaka Utama. Jakarta.
- Supriyatna, 1985. *Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. LAPERA, Pustaka Utama. Yogyakarta.
- McIver and Gillin J. L. 1991. *Perencanaan Sosial dan duniak ketiga*. Gadjia Mada. University Press. Yogyakarta.
- Mubiyarto, 1984. *Pembangunan Pedesaan dan masalah Kepemimpinan*. LIBERTY. Yogyakarta.
- Suyanto M. 2002. *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bottomore T. B. 2004. *Elit dalam Masyarakat*. Gunung Agung. Jakarta.
- Karthohadikusumo S. 2000. *Struktur Interaksi Kelompok Elit dalam Pedesaan*. PT Prima. Jakarta.
- Ugburn William ,1995. *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Masyarakat*. Pustaka Grafita Kita. Jakarta.
- Thoa Miftah ,1986. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. CV Rajawali. Jakarta.
- Siagian P. Sondang ,1983. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.

- Sumber Lain :
- ✓ UU No 12 Tahun 2008
- ✓ UU No 32 Tahun 2004
- ✓ PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa
- ✓ Data Kependudukan Desa Koreng Kec. Tareran Kab. Minahasa Selatan.